



**PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KLASIFIKASI INFORMASI  
YANG DIKECUALIKAN  
TAHUN 2020**

**KLASIFIKASI INFORMASI  
YANG DIKECUALIKAN  
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon 0293 492089 Faximili 0293 4961995

Surat Elektronik: [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) Laman: <http://www.kominfo.temanggungkab.go.id>

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 555/02/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Informasi;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318/Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/02/PPID  
TAHUN 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I keputusan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/02/PPID TAHUN 2020 sebagaimana dimaksud dalam lampiran II penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
SELAKU  
PPID UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG,

  
INDRA SETIAWAN

LAMPIRAN I  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI  
 YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
<b>I</b>	<b>Informasi Persandian/ Keamanan Informasi</b>				
1	Dokumen persandian, meliputi: - Radiogram/Kawat bersandi, berita sandi;  - Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian;  - Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian	- Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran
2	Dokumen Internet Protokol/ Internet Protocol (IP) address private, bandwidth management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	- Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
3	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
4	Laporan Information Technology Security Assessment Pemerintah Kabupaten (Pembab) Temanggung Tahun 2018	Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
5	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	Pasal 25 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
6	Buku Assesment Infrastruktur Jaringan Internet	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
7	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
8	Data aplikasi sebagai berikut: a OS Server yg digunakan b Bahasa Pemograman c Database d User dan password e Manual pengembangan web f IP Public dan IP lokal untuk aplikasi yang di onlinekan g IP Public dan IP lokal untuk aplikasi yang dionlinekan	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
<b>II Informasi Pemerintahan</b>					
9	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kepala/wakil kepala daerah, penyaringan bakal calon kepala desa.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
10	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, CPNS, seleksi kepala sekolah maupun aparatur pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama diperlukan	Menghambat proses seleksi	Menghambat proses seleksi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
<b>III</b>	<b>Informasi Hukum</b>				
11	Berkas perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebelum disampaikan ke pengadilan	- Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;	Sampai putusan berkekuatan hukum tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
12	Daftar anggota/orang yang terlibat organisasi terlarang	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;  - Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.	- Selama masih berlaku;  - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
13	Dokumen kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk:  Kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan saksi;	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Selama masih berlaku;  - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	- Menghambat proses penegakan hukum;  - Mengungkap rahasia pribadi;	- Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum;  - Melindungi data pribadi
14	Dokumen rencana penertiban / penindakan dan penegakan pada obyek tertentu; operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana
15	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai selesainya kasus	- Menggagalkan rencana operasi dan penertiban  - Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
16	Biodata pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	- Mengungkap rahasia pribadi; - Dapat menjadi objek pemerasan	Melindungi data pribadi
17	Data proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Tahun	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
18	Data proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
<b>IV Informasi Kesekretariatan</b>					
19	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bersifat tertutup, meliputi : laporan singkat; catatan rapat; risalah; slide presentasi dan/atau; rekaman, suara/pembicaraan, dan transkrip keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  - Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama belum ada tindak lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
20	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  - Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama belum ada tindak lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
<b>V Informasi Keuangan dan Asset</b>					
21	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung (Renja) dan Draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Sampai mendapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
22	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang belum diaudit atau/unaudited oleh auditor internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Sampai sebagai dokumen terbuka, dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
23	Dokumen pertanggungjawaban keuangan, termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li> </ul>	Sampai sebagai dokumen terbuka, dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
24	Daftar rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;	Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
25	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengkah	Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
26	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ayat 3.b tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Sampai dengan penyerahan ke dua/ Berakhirnya masa pemeliharaan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
27	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ayat 3.b tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
28	Database objek pajak dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> </ul>	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi
29	Data Jumlah Hasil Pengawasan dan Data Penyelesaian Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004</li> <li>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara</li> </ul>	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat proses pemeriksaan;</li> <li>- Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi Laporan Hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP;</li> <li>- Melanggar Peraturan MenpanRB tentang batasan distribusi LHP</li> </ul>
30	Dokumen Barang Milik Negara - Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara(BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah</li> </ul>	2020-2021	Mengganggu kerahasiaan dan keamanan sarana, prasarana dan peralatan BMN	Memastikan kerahasiaan dan keamanan sarana, prasarana dan peralatan BMN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN</li> <li>- Data detail BMN (buku barang Kartu Identitas Barang (KIB), daftar barang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
31	<p>Dokumen Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pengaduan individu/ masyarakat</li> <li>- Laporan hasil audit pemeriksaan reguler</li> <li>- Laporan hasil audit pemeriksaan khusus</li> <li>- Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu</li> <li>- Review keuangan yang belum diaudit</li> <li>- Laporan hasil pengawasan internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia internal instansi</li> <li>- Menghambat proses audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pengaduan terjaga, rahasia dokumen keuangan aman validitas audit</li> </ul>
32	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	1 Tahun	Mengungkap Rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
33	Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan (SPJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Sampai selesai audit	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data keuangan yang bersifat rahasia (selama dalam proses audit)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbup Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020</li> </ul>			
34	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
35	Dokumen untuk proses penilaian yang berupa pertanyaan dan jawaban dari perusahaan yang dinilai yang berupa aset-aset perusahaan, laporan keuangan dan yang bersifat rahasia milik perusahaan yang menggunakan lahan negara untuk usaha perkebunan minimal menguasai 25 Ha lahan	Permentan Nomor 07/ Permentan/ OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009	Sampai ada Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Usaha Perkebunan	Menghindari tuntutan perusahaan kepada tim penilai karena rahasia perusahaan dipublikasikan	Untuk mewujudkan penilaian secara profesional, sehingga menghasilkan pelaku usaha perkebunan yang bermutu
<b>VI Informasi Inspektorat</b>					
36	Data proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 6 dan pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai</li> <li>- Menghambat proses pemeriksaan;</li> </ul>	Menghambat proses pemeriksaan;	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.
37	Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> </ul>	1 Tahun	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);</li> <li>- Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda;</li> <li>- Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</li> <li>- Permen PAN RB Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Pemendagri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2012</li> </ul>			
<b>VII</b>	<b>Informasi Kepegawaian</b>				
38	Database biodata elektronik dan non elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai ada persetujuan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
39	Penilaian Prestasi Kerja PNS/P2KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian</li> </ul>	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
40	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyiangan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pengisian jabatan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>	- Selama masih berlaku;	- Mengungkap rahasia pribadi;	- Melindungi data pribadi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
41	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	- Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	- Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi
42	Identitas PNS yang melanggar disiplin kepegawaian dan dalam proses dijatuhi hukuman, termasuk: - Proses hukuman disiplin PNS, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS; - Proses pemberhentian PNS; - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
43	Data rencana penempatan CPNSD/PNS dan data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulensi hasil rapat Baperjakat.	- Pasal 17 huruf I Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	- Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati  - Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	- Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara prematur  - Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	- Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja  - Mencegah kolusi
44	Data yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan PPNS	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7)	1 Tahun	Penyelidikan akan gagal karena data/lokus kejadian dapat dirubah atau dihilangkan	Terselesaikannya masalah yang sedang terjadi sesuai dengan Standara Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
45	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian</li> </ul>	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
46	Soal tes CPNS	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
<b>VIII Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
47	Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> </ul>	Selama masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
48	Data client jaringan (Dinas Dukcapil)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
49	Topologi dan konfigurasi jaringan LAN (Dinas Dukcapil)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/ mengubah isi/ bentuk dari topologi dan jaringan LAN yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
50	Daftar IP (Dinas Dukcapil)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah IP jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
51	Daftar User dan Pasword perangkat jaringan LAN (Dinas Dukcapil)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
52	Data Aplikasi yang meliputi Bahasa Pemrograman, Database, Source Code (Dinas Dukcapil)	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari aplikasi yang ada	Melindungi Aplikasi dan data yang ada dari kerusakan/penggandaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
53	Data Aplikasi (Dinas Dukcapil) yang diakses oleh instansi Lain	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari aplikasi yang ada	Melindungi Aplikasi dan data yang ada dari kerusakan/penggandaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
54	Data penduduk by name by address (Dinas Dukcapil)	Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	1 Tahun	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
55	User dan Pasword untuk Login SIAK dan KTP Elektronik	Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah biodata seseorang	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
<b>IX</b>	<b>Informasi Pendidikan</b>				
56	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah	- Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;	Sampai dengan pengisian formasi yang ada	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
<b>X</b>	<b>Informasi Kesehatan</b>				
57	Hasil test kesehatan dan psikologi	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

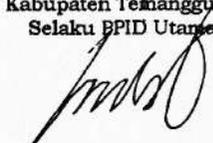
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
58	Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien, baik yang bersifat manual atau elektronik, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>- Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih berlaku;</li> <li>- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
59	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;</li> <li>- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;</li> <li>- Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Tidak terbatas	Melanggar kode etik farmasi	Menghindari penyalahgunaan
60	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</li> <li>- Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
61	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</li> <li>- Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

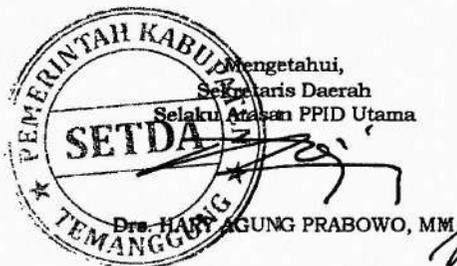
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
62	Hasil cek kesehatan dan uji fisik atlet	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan;  - Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai
63	Dokumen Terkait Kefarmasian dan Alat Kesehatan  - Dokumen perencanaan dan pembekalan farmasi  - Dokumen mutasi  - Dokumen resep yang sudah dilayani	- Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  - PP 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Kesehatan	2020-2021	Mengungkap riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
<b>XI Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM</b>					
64	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama masih berlaku	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan data penerima program perlindungan sosial dan bansos
65	Data identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
66	Hasil wawancara/diagnosis/bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
67	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
68	Proses penetapan dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Sampai dengan Penetapan dan penangguhan UMK	Menimbulkan permasalahan/ polemik dalam pengambilan kebijakan, karena adanya tuntutan	Kepala daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif
69	Kasus-kasus yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial beserta penyelesaiannya	- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama masih berlaku	- Menghambat proses penegakkan hokuma  - Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	- Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakkan hukum  - Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
70	Hasil Mediasi (Perjanjian Bersama/Putusan Bersama)	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama masih dalam penguasaan mediator	Tidak terjaganya kebijakan perusahaan atau data perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
71	Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB)	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
<b>XII Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan</b>					
72	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/ Perseorangan	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Selama masih dalam proses pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Inteluaktual (HAKI)	Memberikan perlindungan HAKI
73	Dokumen riset terhadap obyek tertentu	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
74	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum pada 2 kabupaten/kota atau lebih	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Peretujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>
75	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, aset dan design bangunan	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Tahun	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan/ perusahaan	Melindungi dokumen perorangan/perusahaan yang bersifat rahasia

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku BPID Utama

  
Drs. INDRA SETIAWAN



LAMPIRAN II  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2020 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN  
 INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ruang Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> </ul>	Sampai dengan pengisian formasi yang ada	Mengungkap data pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen Barang Milik Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)</li> <li>- Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN</li> <li>- Data detail BMN (buku barang Kartu Inventaris Barang, daftar barang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	2020-2021	Mengganggu kerahasiaan dan keamanan sarana, prasarana dan peralatan BMN	Memastikan kerahasiaan dan keamanan sarana, prasarana dan peralatan BMN
3	Dokumen Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pengaduan individu/ masyarakat</li> <li>- Laporan hasil audit pemeriksaan reguler</li> <li>- Laporan hasil audit pemeriksaan khusus</li> <li>- Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu</li> <li>- Review keuangan yang belum diaudit</li> <li>- Laporan hasil pengawasan internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia internal instansi</li> <li>- Menghambat proses audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pengaduan terjaga, rahasia dokumen keuangan aman, validitas audit</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
19	Buku Assesment Infrastruktur jaringan internet	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
20	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
21	Data aplikasi sebagai berikut: a OS Server yg digunakan b Bahasa Pemograman c Database d User dan password e Manual pengembangan web f IP public dan IP local untuk aplikasi yang di onlinekan g IP public dan IP local untuk aplikasi yang di onlinekan	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
22	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional; - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
23	Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Perbup Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020	Sampai selesai audit	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia.	Melindungi data keuangan yang bersifat rahasia (selama dalam proses audit)

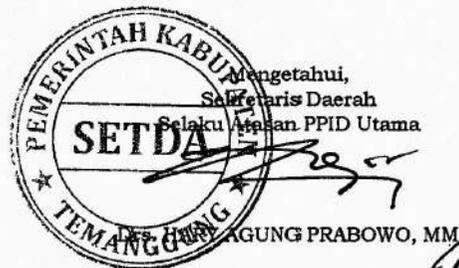
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
10	Data Aplikasi yang meliputi Bahasa Pemrograman, Database, Source Code	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari aplikasi yang ada.	Melindungi Aplikasi dan data yang ada dari kerusakan atau penggandaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
11	Data Aplikasi yang diakses oleh instansi Lain	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari aplikasi yang ada.	Melindungi Aplikasi dan data yang ada dari kerusakan atau penggandaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
12	Data penduduk by name by address	Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	1 Tahun	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
13	User dan Password untuk Login SIAK dan KTP Elektronik	Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah biodata seseorang	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
14	Proses Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan Perda PPNS dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Tahun	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
15	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Tahun	Mengungkap Rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
16	Laporan Information Technology Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018	Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
17	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	Pasal 25 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
18	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
4	<p>Dokumen Terkait Kefarmasian dan Alat Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perencanaan dan pembekalan farmasi</li> <li>- Dokumen mutasi</li> <li>- Dokumen resep yang sudah dilayani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>- PP 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Kesehatan</li> </ul>	2020-2021	Mengungkap riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
5	Data yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan PPNS	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah	1 Tahun	Penyelidikan akan gagal karena data/lokus kejadian dapat dirubah atau dihilangkan	Terselesaikannya masalah yang sedang terjadi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP
6	Data client jaringan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
7	Topologi dari konfigurasi jaringan Local Area Network (LAN) Dinas Dukcapil	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/ mengubah isi/ bentuk dari topologi dan jaringan LAN yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
8	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah IP jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
9	Daftar User dan Password perangkat jaringan LAN Dinas Dukcapil	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
24	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
25	Data Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK Alamat, Nomor Telepon, Alamat elektronik	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 huruf c	Terbatas sesuai ketentuan Undang-Undang	Mencegah penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Perlindungan data pribadi
26	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat (BKPSDM)	- Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
27	Soal tes CPNS	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN

Sekretaris Dinas Komunikasi  
Dan Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku PPID Utama

*[Signature]*  
Drs. INDRA SETIAWAN





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon 0293 492089 Faximili 0293 4961995

Surat Elektronik: [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) Laman: <http://www.kominfo.temanggungkab.go.id>

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Nomor : 01/ BA PPID TMG/ 2020**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 telah dilaksanakan Uji Konsekuensi melalui fasilitas Video Convergence dengan peserta dan persetujuan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

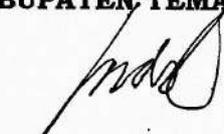
Hasil dari Uji Konsekuensi telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh tim PPID Utama dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung disepakati sebagai berikut:

1. Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini,
2. Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran berita acara ini ditetapkan dengan SK PPID Utama dengan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Temanggung.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung.

**PPID UTAMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**Drs. INDRA SETIAWAN**

NIP. 19640501 199203 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Lt. 3-4 Temanggung Kodepos 56216  
Telepon 0293 492089 Faximili 0293 492089  
Surat Elektronik : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id)

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sadwoko Heri Susatyo, S.E., M.Si.  
NIP : 196010091989031007  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung  
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 28 April 2020

  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
  
SADWOKO HERI SUSATYO, S.E., M.SI.  
NIP: 196010091989031007



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan. Jend. A. Yani Nomor 32 E Temanggung 56212 Telp. (0293) 491124. Faximili. (0293) 491124  
Surat elektronik : [bkd@temanggungkab.go.id](mailto:bkd@temanggungkab.go.id)

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Teguh Suryanto  
NIP : 19610529 198503 1 005  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 28 April 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan no 94 Paingan Temanggung 56227  
Telp. & Faks (0293) 491032, 492178, 493702 e-mail : [dppkad-tmg@temanggungekab.go.id](mailto:dppkad-tmg@temanggungekab.go.id)

---

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI ELFIATI, S.E., S.Hi., M.M.  
NIP : 19620814 198607 2 001  
Jabatan : Sekretaris BPPKAD  
Instansi : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 12 Mei 2020  
An. Kepala BPPKAD  
Sekretaris

  
**SRI ELFIATI, S.E., S.Hi., M.M.**  
NIP. 19620814 198607 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Jalan Suyoto Nomor 7, Temanggung Kode Pos 56216

Telepon 0293 491990; Faximili 0293 491990

Surat elektronik : [disnakan.temanggungkab@gmail.com](mailto:disnakan.temanggungkab@gmail.com) laman : [www.disnakan.temanggungkab.go.id](http://www.disnakan.temanggungkab.go.id)

**FORMULIR PESETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Slamet Saryono, SH, SP, MM  
NIP. : 19610719 198603 1 012  
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Instansi : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 28 April 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA**

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227 Telepon/Faximile (0293) 491148/4960786  
E-mail : [dindik@temanggungkab.go.id](mailto:dindik@temanggungkab.go.id) Website : [dindikpora.temanggungkab.go.id](http://dindikpora.temanggungkab.go.id)

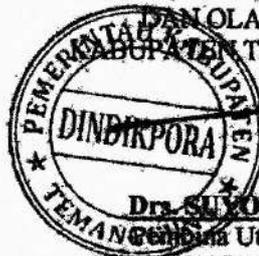
**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUYONO, M.M.  
NIP : 19610210 198503 1 011  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,  
DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Drs. SUYONO, M.M.**  
Kepala Dinas Utama Muda  
NIP. 19610210 198503 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung ( Lab. Tembakau )  
Kode Pos 56221 Telepon / Faximili : (0293) 4901569  
surat elektronik : [dlh.temanggung@gmail.com](mailto:dlh.temanggung@gmail.com) laman : [dlh.temanggungkab.go.id](http://dlh.temanggungkab.go.id)

---

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir.M.A.AGUS PRASODJO

NIP : 19600829 198903 1 004

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 17 April 2020  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Temanggung



**Ir. M. A. AGUS PRASODJO**  
NIP. 19600829-198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216 Telepon (0293)  
491004 Faximile (0293) 491040

Surat Elektronik : [temanggunginspektora@temail.com](mailto:temanggunginspektora@temail.com) Laman : [www.inspektora.temanggungkab.go.id](http://www.inspektora.temanggungkab.go.id)

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SUJARWO, AP, MM

NIP : 19750805 199311 1 001

Jabatan : Inspektur Kabupaten Temanggung

Instansi : Inspektorat Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 16 April 2020



**AGUS SUJARWO, AP, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801

Surat Elektronik : [bappeda@temanggungkab.go.id](mailto:bappeda@temanggungkab.go.id), Laman : [www.bappeda.temanggungkab.go.id](http://www.bappeda.temanggungkab.go.id)

FORMULIR PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ripto Susilo  
NIP : 19670427 198703 1 001  
Jabatan : Kepala Badan  
Instansi : Bappeda Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 24 April 2020

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG



*Ripto Susilo*  
**RIPTO SUSILO**

Pejabat Tingkat I

NIP. 19670427 198703 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257  
Surat Elektronik : [bapermades@temanggungkab.go.id](mailto:bapermades@temanggungkab.go.id) Laman : [diinpermades.temanggungkab.go.id](http://diinpermades.temanggungkab.go.id)

---

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM  
NIP : 19700730 199001 2 002  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Temanggung  
Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 8 Mei 2020  
  
KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Dra. GEMA ARTISTI W. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700730 199001 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung Kode Pos 56221  
Telepon / Faksimili : 0293 - 4901790 Surat Elektronik: [datasatpol@gmail.com](mailto:datasatpol@gmail.com)  
Laman : [www.satpolppdamkar.temanggungkab.go.id](http://www.satpolppdamkar.temanggungkab.go.id)

Temanggung, 22 April 2020

Nomor : P/105/555/IV/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Data yang dikecualikan

Kepada:  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
di-  
TEMANGGUNG

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si

NIP : 19681210 199001 1 001

Jabatan : Kepala

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui daftar informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 22 April 2020.

KEPALA DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681210 199001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Telp. (0293) 491283 Fax (0293) 491283  
Surat elektronik: dpmpstptemanggung@yahoo.com, Lamaran: dpmpstptemanggungkab.go.id

**FORMULIR PERSETUJUAN**

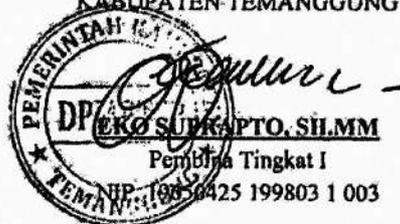
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Suprpto, SH.MM  
NIP : 19650425 199803 1 003  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Temanggung, 21 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximili (0293) 491143  
Temanggung 56218 Surat Elektronik : [dinkestemanggung@yahoo.co.id](mailto:dinkestemanggung@yahoo.co.id)  
Laman : [dinkes.temanggungkab.go.id](http://dinkes.temanggungkab.go.id)

---

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Suparjo, M.Kes  
NIP : 19610731 198903 1 008  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Pahlawan Nomor 98 Temanggung Kode Pos 56227 Telepon 0293-491127  
Faximili 0293-493927 surat elektronik : [dukcapiltemanggung@gmail.com](mailto:dukcapiltemanggung@gmail.com)  
laman: [www.dindukcapil.temanggungkab.go.id](http://www.dindukcapil.temanggungkab.go.id)

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM.

NIP : 19611110 198503 1 018

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, April 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM.**

Rembina Utama Muda  
NIP. 19611110 198503 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Suwandi Suwandi Nomor 1 Temanggung kodepos 56218 Telepon (0293) 491021 Faksimili (0293) 491021  
surat elektronik : [arpusdok@temanggungkab.go.id](mailto:arpusdok@temanggungkab.go.id) laman : <https://www.dinarpus.temanggungkab.go.id>

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, M.M.  
NIP : 19641114 199003 1 005  
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung  
Instansi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 22 April 2020

KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



*[Signature]*

**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219  
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id) Laman: [rsud.temanggungkab.go.id](http://rsud.temanggungkab.go.id)

**FORMULIR PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr.Tetty Kurniawati, Sp.S, M.Kes  
NIP : 19760401 200312 2 010  
Jabatan : Direktur RSUD Kabupaten Temanggung  
Instansi : RSUD Kabupaten Temanggung

Menyatakan telah meneliti dengan seksama dan menyetujui Daftar Informasi sebagaimana terlampir, untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, 20 April 2020

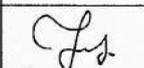
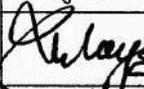
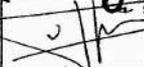
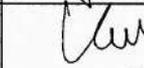
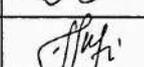


**dr. TETTY KURNIAWATI, Sp. S, M.Kes**

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

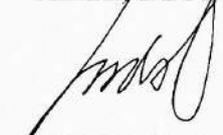
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dihadiri dan disetujui oleh dinas terkait lewat formulir persetujuan sebagai pengganti daftar hadir :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Indra Setiawan	Septanuis	Kominfo	
2	Sutrisna	Kabid Informatika	Dinkominfo	
3	Enan. Wd.	Kabid Informatika	Ukup	
4	Pulaya Si Swazly	Bid Komikasi	Kominfo	
5	Farrda Istiningrith.	Kasi Pemberdayaan	Dinkominfo	
6	Am U.	Ka Umpeg	---	
7	Eko Kus Prasetyo	Bid. Pelayanan Informasi	PPID Utama	
8	Syriyati	Kasubag Perencanaan	Dinkominfo	
9	Hasan Darajat	Kasi Informatika	Dinkominfo	
10	Mugrah bntawan	Kasi PSI	Dinkominfo	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

PPID UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG

  
Drs. INDRA SETIAWAN